

FRAME PEMBERITAAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DI MEDIA ONLINE

^{1*}Hamzah, ²Jehan M Bastari

¹ Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Stisipol Candradimuka,

² Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Stisipol Candradimuka

*Email: hamzah@stisipolcandradimuka.ac.id

ABSTRAK

Media *online* memiliki banyak keunggulan untuk menyampaikan berita kepada masyarakat, salah satunya kecepatan berita yang jauh melebihi media konvensional surat kabar. Berita di media online dipengaruhi oleh ideologi media dilihat dari berita yang dilakukan media. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana framing berita dan pattern berita yang dilakukan oleh media dalam menyampaikan suatu peristiwa. Peneliti menggunakan paradigma konstruksionis dengan pendekatan kualitatif. Analisis framing dengan menggunakan model Robert N. Entman, dan hasilnya menunjukkan bahwa framing Republika.co.id terhadap berita pembubaran Front Pembela Islam (FPI) menunjukkan bahwa Republika.co.id mengkritik kebijakan pemerintah. sikap berlebihan terhadap pembubaran. Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI). Sedangkan yang dilakukan Detik.com mendukung pemerintah dalam upaya membubarkan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Media juga berusaha menyadarkan masyarakat bahwa berita yang disajikan tidak selalu berjalan beringan, karena setiap media memiliki kebijakan politik dalam menyajikan berita. Namun dalam hal ini masyarakat sebagai sasaran dari berbagai media sebenarnya harus memahami apa yang disebut dengan *framing*, agar ketika Publik dihadapkan pada berbagai berita di media maka publik tidak malas menerima apa yang disampaikan oleh media.

Kata Kunci: Analisis, *Framing*, Berita, Pembubaran FPI

ABSTRACT

Online media has many advantages in conveying news to the public, one of which is the speed of news which far exceeds conventional media such as newspaper. News coverage in online media is influenced by media ideology as seen from the news framing carried out by the media. This study aims to describe how news framing and news trends are carried out by media in conveying an event. This study uses a constructionist paradigm with a qualitative approach. Framing analysis was carried out using Robert N. Entman's model, and the results showed that Republika.co.id's framing of news of the disbandment of the Islamic Defenders Front (FPI) showed that Republika.co.id tended to criticize government policies. excessive attitude towards disbandment. Islamic Defenders Front (FPI) Community Organization. Meanwhile, Detik.com's framing supports the government in its efforts to disband the Islamic Defenders Front (FPI). Then, the media also tries to make people aware that the news presented by the media does not always go hand in hand, because every media has a political policy in presenting its news. However, in this case, the audience as the target of various media actually needs to understand

what is called framing, so that when the audience is faced with various news in the media, the audience is not lazy to accept what is conveyed by the media.

Keywords: Analysis, Framing the News, FPI disbandment

PENDAHULUAN

. Praktikanya, komunikasi compositions penyampaian pesan kepada orang lain. *Customized structure* pesan merupakan kunci dari komunikasi. Komunikasi bisa terjadi ketika ada pesan yang ingin disampaikan kepada pihak lain. Pesan tidak terbatas pada informasi, tetapi ada juga simbol lambang adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang lain, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Simbol meliputi *customized structure individualized organization* (pesan verbal), nonverbal, dan objek yang maknanya disepakati bersama. Kemampuan manusia dalam menggunakan simbol atau lambang memungkinkan berkembangnya bahasa dan menangi hubungan antara manusia dengan benda (baik nyata maupun abstrak) tanpa kehadiran manusia dan benda.

Salah satu unsur komunikasi adalah komunikasi massa. Sejauh ini, media massa terus tumbuh bertemu komunitas sesuai dengan fungsi. tentang pers di Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, fungsi pers harus menghibur, menginformasikan, medidik dan melaksanakan pengawasan sosial, baik untuk umum dan untuk pemerintah. Perkembangan pesat teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa Internet sebagai alat komunikasi dengan permintaan tinggi oleh masyarakat. Hal inila yang fleksibel untuk perubahan komunikasi konvensional menjadi modern dan total digital.

Media masa, termasuk media *online*, merupakan tempat di mana ideologi dihadirkan. di salah satu sisi, media menjadi tempat penyebaran Ideologi penguasa, bahkan sebagai kontrol atas wacama publik. Setiap media memiliki *frame* yang berbeda untuk mengemas berita, yang tergantung dari ideologi masing-masing media massa. Munculnya media *online*, *headline* yang tidak sesuai dengan isi berita, masyarakat jadi semakin sulit mencermati berita yang ada. Banyak berita di media *online* yang belum tentu fakta sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Konten berita bisa mengarah ke komunitas, sehingga mudah terprovokasi atau friksi di dalam komunitas.

Kasus yang belum lama ini dibicarakan masyarakat berasal dari organisasi masyarakat front pembela islam atau yang disingkat dengan FPI merupakan organisasi masyakat yang dipimpin oleh Habib Rizieq Shihab dan didirikan pada 17 agustus 1998 deklarasi ini terjadi setelah 3 bulan tumbangnya orde baru, FPI didekarasikan tokoh agama sebagai mubaligh di atas mimbar-mimbar dakwa.

Belum lama ini FPI dibubarkan oleh menteeri menkopolhukam, pada hari rabu, 30 desember 2020. Pembubaran dan larangan itu tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB). Peneliti mencoba menggali konstruksi realitas dalam pemberitaan pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan konsep pembingkaiian (*framing*) menggunakan analisis bingkai Robert N. Entman. Peneliti tertarik menggunakan model ini karena jenis bingkai ini sedang dalam *expositions* seleksi dan menonjolkan beberapa aspek dari suatu situasi untuk memunculkan interpretasi tertentu.

Identifikasi Masalahnya ada tiga yaitu: [1] Masih kurangnya cara mengkonstruksi berita (*framing*) pada media *online republika.co.id* dan *detik.com*. [2] kebanyakan khalayak mengkonsumsi berita media *online* hanya dilihat dari judul berita. [3] Analisis *framing* seputar pemberitaan pembubaran FPI menurut sudut pandang pemerintah dan tokoh politik serta agama. pada media *republika.co.id* dan *detik.com* yang banyak di isukan sebagai ormas radikal sehingga dibubarkan.

Perumusan masalah penelitian ini, bagaimana membingkai media online dengan berita pembubaran organisasi komunitas FPI di Media *Republika.co.id* dan *Detik.com*? yang menjadi

tujuan dari Penelitian untuk mengetahui bagaimana bingkai (*framing*) media *online* terhadap berita pembubaran organisasi masyarakat FPI di media *republika.co.id* dan *detik.com*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif merupakan metode menggunakan tren, perhitungan non-numerik, deskripsi skenario, wawancara, analisis isi, bola salju, dan teks dalam rekomendasi penelitian, proses, asumsi, investigasi lapangan, analisis data, dan kesimpulan data. Metode kualitatif mencoba menjelaskan realitas dengan menggunakan penjelasan deskriptif dengan bentuk kalimat (Sugeng Pujilaksono, 2016:35).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Framing Republika.co.id

Media *Republika.co.id* mempublikasikan berita Pembubaran Front Pembela Islam pada tanggal 31 Desember 2020 - 09 Januari 2021 pada periode tersebut ada banyak berita yang dipublikasikan dan pada keseluruhan berita-berita tersebut *Republika.co.id* terlihat menyampaikan secara kacamata hukum dan opini tokoh politik dalam menanggapi dan memberitakan Pembubaran Front Pembela Islam. Hal tersebut terlihat dari judul, lead, gambar dan teks yang digunakan dalam menyusun berita. peneliti memilih lima berita yang akan dianalisis untuk mengetahui pandangan, tujuan, dan konstruksi dari *Republika.co.id* terkait berita Pembubaran Front Pembela Islam.

Masing-masing dengan judul, “Legislator PKS: Pembubaran FPI Ciderai Amanat Reformasi” yang berisi kritik terhadap pemerintah sebagai penguasa, dianggap memiliki kekuasaan untuk berbuat apa saja. Termasuk membungkam mereka yang dianggap tidak sepaham dengan pemerintah.

Pada berita berjudul “Persis: Pembubaran Ormas FPI Bernuansa Intimidasi Kelompok Oposisi” yang berisi Dikhawatirkan pembubaran atau pelarangan dan pembekuan semua kegiatan FPI bisa dimaknai sebagai kontra oleh pemerintah terhadap kelompok oposisi kritis. Kecuali Ormas yang mengusung ideologi yang secara tegas dilarang oleh undang-undang di Indonesia, seperti ideologi komunisme dan sejenisnya.

Pada berita selanjutnya yang berjudul “masalah FPI, Waketum MUI singgung sila ke 4 Pancasila” yang berisi persoalan FPI ini sebetulnya karena berbeda pendapat dengan pemerintah. FPI, juga bukan perampok ataupun koruptor. Namun, dia melihat, ada kesamaan antara FPI dan Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Anwar menyinggung pancasila e empat Pancasila yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” musyawarah itu sudah menjadi budaya bangsa. Apalagi Indonesia bukanlah negara otoriter.

Berita selanjutnya yang berjudul “FPI bukanla ormas terlarang beda dengan PKI ujar Hamdan Zoelva” yang berisi krtitikan terhadap larangan penyebaran konten FPI Permasalahan FPI ini secara yuridis tidak memproses berkasnya ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) hal ini berbeda dengan PKI yang merupakan pihak terlarang dan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107a dari KUHP. Jadi tidak ada hubungan jika orang menyebarkan konten FPI mereka akan dihukum. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No 82 /PUU - XI/2013, ada 3 jenis ormas, yaitu berbadan hukum, terdaftar dan tidak terdaftar. Ormas yang tidak terdaftar tidak mendapatkan pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas yang terdaftar menerima pelayanan negara.

Berita yang terakhir berjudul “Pengamat: Kepolisian Jangan Berlebihan Tangani Soal FPI” yang berisi kritikan dari Feri Amsari Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, terhadap Maklumat Kapolri terkait kepatuhan terhadap larangan penggunaan simbol, kegiatan, dan atribut serta pemberhentian kegiatan FPI itu, membuat polisi bisa memidanakan siapapun yang menyebarkan konten FPI. Dalam hal ini, membuat FPI seperti ormas terlarang dan membatasi demokrasi. Kelima berita tersebut kita akan melihat bagaimana berita pembubaran Front Pembela Islam dibingkai oleh *republika.co.id*. Beberapa alasan mengapa faktor kritik bisa menjadi hal yang dominan dalam pemberitaan pada media *Republika.co.id* setiap berita yang mereka publikasikan. Pandangan *Republika.co.id*, kasus ini dipenuhi dengan nuansa kritik dari para tokoh politik dan kacamata hukum, dimana para tokoh menuntut agar pihak pemerintah dan kepolisian tidak terlalu berlebihan dalam membubarkan dan melarang segala hal yang berhubungan dengan Front Pembela Islam.

Tabel 1. *Frame*: Pembubaran Front Pembela Islam di *Republika.co.id*

<i>Define Problems</i>	Pembubaran Front Pembela Islam (FPI). dinilai menciderai demokrasi dan dinilai sebagai intimidasi terhadap pihak oposisi
<i>Diagnosa causes</i>	Menkopolkam bersama dengan SKB terkait pembubaran Front Pembela Islam (FPI) dan POLRI terbitkan surat telegram rahasia (STR).
<i>Make Moral Judgement</i>	menekankan dimana tak selalu keputusan yang dibuat pemerintah mengenai pembubaran front pembela islam atau FPI menimbulkan nilai moral baik terhadap masyarakat. Terutama dari sisi pandangan kacamata hukum dan tokoh politik tanah air.
<i>Treatment Recommendation</i>	Pemerintah dan kepolisian memikirkan dampak dari pembubaran Front Pembela Islam serta dampak dari dikeluarkannya Surat Telegram Rahasia (STR)

Sumber: diolah oleh Penulis, 2020

Framing Detik.com

Media detik.com mempublikasikan berita tentang pembubaran (FPI) atau front pembela islam ini pada tanggal 30 Desember 2020 - 09 Januari 2021 pada periode tersebut banyak berita yang dipublis dan hampir dari keseluruhan detik.com menampilkan berita-berita yang menarik untuk dibaca hal tersebut terlihat dari gambar, judul, lead, dan isi berita yang banyak menampilkan sisi positif dan terkesan memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah terkait pembubaran front pembela islam, ada enam berita yang peneliti ambil dari *Detik.com*.

Masing-masing dengan judul, “Wakil ketua MPR nilai wajar pembubarann FPI demi eksistensi NKRI” yang berisi mendukung pemerintah yang telah tegas membubarkan ormas Front Pembela Islam (FPI). Pembubaran dilakukan karena FPI dianggap bertentangan dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Lalu pada berita selanjutnya meneliti mengambil berita berjudul "Bekas Anggota Bersyukur Pemerintah Larang FPI di Indonesia" yang berisi dua mantan anggota FPI bersyukur pemerintah telah melarang kegiatan ormas yang mereka ikuti di masa lalu.

Pada berita selanjutnya berjudul “Aktivitas FPI dilarang, Ridwan Kamil: Indonesia Butuh Kedamaian” yang berisi Menurutnya, masyarakat harus mengikuti aturan hukum yang berlaku, keputusan pusat terkait pembubaran FPI sudah diteruskan kepada seluruh daerah jawa barat dan menghimbau agar seluruh warga jawa barat menaati keputusan SKB tersebut.

Pada berita berikutnya berjudul “Kopolnas Sebut Maklumatt Kapolri mengenai FPI Merujuk Pada SKB menteri” yang berisi Dasar aturan maklumat tersebut dinilai sudah sah,

berdasarkan SKB Menteri, Front Pembela Islam secara de jure dianggap telah bubar mulai dari 21 Juni 2019. Poengky menilai Maklumat Kapolri itu sudah sesuai dengan SKB Menteri. Para pegiat HAM tidak perlu khawatir karena Maklumat Kapolri berisi konten yang dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam berita berikutnya yang berjudul "Hendropriyono Soal FPI Menjadi Front Persatuan Islam: Ada Sesuatu yang di pertahankan" yang memuat Front Pembela Islam yang kini telah dilarang, namun didirikan kembali atas nama Front Persatuan Islam Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer dan Sekolah Tinggi Intelijen Negara, AM Hendropriyono, menilai perubahan hanya melihat bagaimana reaksi pemerintah.

Pada berita yang terakhir peneliti mengambil berita berjudul "PPATK Blokir 59 Rekening FPI" yang berisi Rekening bank milik Front Pembela Islam (FPI) dibekukan sementara oleh Pusat Pelaporan dan Analises Transaksi Keuangan atau PPATK.

Tabel 2. *Frame*: Pembubaran Front Pembela Islam di Detik.com

<i>Define Problems</i>	Pembubaran Front Pembela Islam merupakan tindakan yang tepat, dimana peristiwa pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sesuai dengan peraturan yang berlaku
<i>Diagnosa causes</i>	Menkopolkukam bersama dengan surat keputusan bersama atau SKB terkait pembubaran organisasi masyarakat FPI serta maklumat soal FPI yang diterbitkan POLRI surat telegram rahasia (STR) dan mengenai perubahan nama yang awalnya Front Pembela Islam menjadi front Perstuan Islam
<i>Make Moral Judgement</i>	Penilaian moral yang dikenakan pada berita kali ini lebih menekankan dimana respons positif dari pemerintah dan mengajak untuk kembali menjaga kedaulatan NKRI yang penuh dengan keberagaman serta mengikuti segala peraturan yang berlaku sesuai dengan UU serta mengikuti Instruksi pemerintah pusat
<i>Treatment Recommendation</i>	mencoba untuk memberikan berita dengan tema yang lebih meyakinkan masyarakat bahwa keputusan pemerintah sudah tepat sesuai dengan peraturan, mengingat ketika keputusan Pembubaran Front Pembela Islam diumumkan tak sedikit respons menentang keputusan.

Sumber: diolah oleh Penulis, 2020

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dalam pemberitaan Pembubaran Front Pembela Islam pada *Republika.co.id* dan *Detik.com* periode tanggal 30 Desember 2020- 09 Januari 2021 peneliti menemukan bahwa secara umum, pemberitaan Pembubaran Front Pembela Islam (FPI) ini dapat dimaknai dari dua sisi, yang pertama berasal dari media *Republika.co.id* memberitakan Pembubaran Front Pembela Islam dengan unsur kritikan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai mencederai demokrasi dan intimidasi terhadap pihak oposisi, terlihat menyampaikan secara kacamata hukum dan opini tokoh politik yang mereka jadikan narasumber. Media *detik.com*, dalam memberitakan pembubaran Front Pembela Islam ini memiliki kesan mencoba untuk memberikan berita dengan tema yang lebih meyakinkan masyarakat bahwa keputusan pemerintah sudah tepat sesuai dengan peraturan, terlihat dari narasumber yang diambil yang rata-rata setuju dengan keputusan menkopolkukam dan surat keputusan bersama (SKB) serta keputusan maklumat Kapolri dengan mengeluarkan surat telegram rahasia. itulah hasil analisis yang peneliti lakukan dengan menggunakan model analisis

bingkai Robert N. Entman untuk membeberkan analisis serta menguraikan pada kesimpulan penelitian dengan empat aspek utama yaitu *defini problem* (pendefinisian masalah), *diagnosse causes* (memperkirakan masalah), membuat keputusan moral (*make moral judgment*), dan *tretment recomendation* (menekankan penyelesaian masalah).

Mendapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan pembedaan dalam pemberitaan pembubaran front pembela islam (FPI) yang dilakukan oleh media republika.co.id dan Detik.com. Pada praktiknya, framing dilakukan oleh media dengan memilih isu tertentu dan mengabaikan isu lain serta menekankan atau menonjolkan aspek realitas tertentu. Dalam konsep *framing* pada dasarnya mengacu pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi atas peristiwa yang sedang dibahas. Semua aspek ini digunakan untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan mudah diingat oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Canggara, H. (2006). Teori Ilmu Komunikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada.
- Eriyanto. (2002). Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Jogyakarta: LKiS Group.
- Nurudin. (2007). Pengantar komunikasi Masa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis semiotik, Analisis wacana, dan Analisis Framing. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.